



Target PBB 2011, Rp 36,32 Miliar

DPDPK Gelar Pekan Panutan PBB

JOGJA - Demi memenuhi target Rp 36,32 miliar dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja menggelar pekan panutan pembayaran PBB. Dari pekan panutan ini, mereka mengharapkan, 89.800 wajib pajak patuh dan dapat merealisasikan angka pemasukan tersebut.

"Target tahun ini sama dengan target tahun sebelumnya," kata Kepala

DPDPK Arbak Yhoga Widodo di sela pembukaan pelaksanaan pekan panutan pembayaran PBB di aula balai kota Jogja, kemarin (24/5).

Yhoga menjelaskan, target tersebut sesuai potensi kenaikan dari realisasi PBB tahun 2010. Dimana tahun lalu, pihaknya hanya bisa merealisasikan pajak sebesar 88,17 persen dari obyek pajak. Nilainya mencapai Rp 31,945 miliar.

Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Jogja Wisnu Budi Irianta mengatakan, realisasi PBB tak optimal karena banyaknya asrama pelajar serta tingginya mobilisasi

masyarakat. Alhasil, wajib pajak akhirnya kerap mangkir dari kewajibannya.

Pembayaran yang mereka lakukan bahkan banyak yang sudah jatuh tempo. Akibatnya, mereka dikenai denda sebesar dua persen tiap bulan. "Maksimal, diberi tenggang waktu sampai 24 bulan atau dua tahun," imbuhnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nanti turut berperan meningkatkan bagi hasil PBB, DPDPK menggelar pekan panutan. Mereka mengundang 615 wajib pajak orang pribadi dari aparat

pemerintah, tokoh masyarakat, dan pengusaha untuk mengikuti Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan 2011 Kota Jogja.

"Tujuan pekan panutan pajak ini untuk memberikan panutan dan keteladanan membayar pajak sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan," kata Yhoga.

Kegiatan ini diikuti Wali Kota Herry Zudianto, Wakil Wali Kota Haryadi Suyuti, keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo, dan aparat pemkot yang memiliki aset di Kota Jogja.

Pada kesempatan ini, Herry Zudianto mengajak wajib taat membayar PBB. Sebab, pajak adalah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan kota. "Masyarakat yang taat membayar pajak juga akan menjadi bagian dari keistimewaan Kota Jogja, apalagi masyarakat kota memiliki kepatuhan yang tinggi membayar pajak," katanya.

Dia menambahkan, dengan tingginya angka kepatuhan ini, pemkot berkomitmen mengimbangi kesadaran masyarakat membayar pajak tersebut. Yakni dengan pengelolaan keuangan yang baik dan mampu

dipertanggungjawabkan.

"Apalagi, pajak bumi dan bangunan segera dikelola sepenuhnya oleh pemerintah kota, mulai dari penarikan hingga pemanfaatannya," tambah wali kota.

Pada 2009, laporan keuangan pemkot Jogja mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian. Herry berharap, itu dapat terjadi lagi pada penilaian di tahun 2010.

Dalam kesempatan pekan panutan pajak bumi dan bangunan tersebut, wali kota membayarkan pajak untuk rumah dinas wali kota dan delapan objek pajak pribadi lainnya. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005